PERTAMINA
PHE NSO

LAPORAN PPM

PERTAMINA HULU ENERGI NORTH SUMATRA OFFSHORE

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan saat ini menuntut keterlibatan aktif berbagai pihak dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, perusahan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai entitas bisnis yang menjalankan kegiatan operasional, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah sekitar operasionalnya. Melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan inisiatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program pengembangan masyarakat pada dasarnya memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keselarasan program dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah. Akademisi berkontribusi melalui dukungan kajian ilmiah, pengembangan pengetahuan, serta inovasi yang dapat memperkuat kualitas program. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi komunitas. Kolaborasi multipihak ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan program CSR yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program CSR memerlukan perencanaan yang sistematis agar kegiatan yang dilaksanakan tidak bersifat sporadis atau hanya berorientasi jangka pendek. Program pengembangan masyarakat perlu dirancang secara terstruktur dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di wilayah program. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dirancang mampu memberikan dampak yang relevan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam perencanaan program pengembangan masyarakat adalah tersedianya baseline studi yang komprehensif mengenai kondisi sosial masyarakat, termasuk tingkat kerentanan, potensi lokal, serta dinamika sosial yang berkembang di wilayah program. Baseline studi menjadi dasar yang penting dalam memahami karakteristik masyarakat secara lebih mendalam, sehingga perusahaan dan para pemangku kepentingan dapat merumuskan intervensi program yang tepat sasaran, berbasis kebutuhan nyata, serta mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Berdasarkan hasil pemetaan kondisi sosial tersebut, program CSR PT. Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore (akan disingkat menjadi PHE NSO) dapat diarahkan pada berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan ketahanan sosial dan lingkungan. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai sumber daya yang dimiliki PHE NSO dan para mitra, termasuk dukungan pendanaan, keterlibatan sumber daya manusia, pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, serta penguatan jaringan kemitraan dengan berbagai lembaga. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan kolaboratif menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap kegiatan program dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan CSR menjadi bagian penting dalam mendokumentasikan proses perencanaan, implementasi, serta capaian program pengembangan masyarakat yang telah dilaksanakan. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas PHE NSO kepada para pemangku kepentingan sekaligus sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program di masa mendatang. Dengan dokumentasi yang sistematis dan informatif, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan program CSR yang lebih terencana, berbasis data, kolaboratif, serta berorientasi pada pencapaian dampak pembangunan yang berkelanjutan.

B. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran

a. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program CSR PHE NSO. Secara khusus, tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan secara sistematis pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh PHE NSO selama periode pelaporan.
2. Menyajikan informasi yang jelas, transparan, dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program CSR PHE NSO.
3. Menjadi instrumen monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program pengembangan masyarakat.
4. Mengidentifikasi capaian, pembelajaran, serta tantangan dalam pelaksanaan program sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.
5. Mendukung penguatan tata kelola program CSR yang terencana, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan serta pemberdayaan masyarakat.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pelaksanaan program pengembangan masyarakat mencakup beberapa aspek utama yang menjadi bagian dari implementasi program CSR PHE NSO, yaitu:

- **Wilayah/Lokasi Program**

  Laporan ini mencakup kegiatan program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah operasional PHE NSO dan wilayah yang memiliki keterkaitan sosial dan ekonomi dengan aktivitas produksi perusahaan. Dalam hal ini, PHE NSO memiliki dua wilayah utama berdasarkan wilayah operasional PHE NSO, yakni Kota Lhokseumawe dengan titik utama beberapa desa di Kecamatan Muara Satu, dan Kabupaten Aceh Utara dengan dua desa yang berada di dua Kecamatan berbeda, yakni Desa Teupin Kuyuen di Kecamatan Senuddon; dan Desa Blang Pante di Kecamatan Paya Bakong.

- **Pilar Program Pengembangan Masyarakat**

  Pedoman dari SKK Migas mengarahkan agar program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh KKKS disusun secara sistematis dengan adanya pembagian pilar program. Pembagian pilar Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di sektor hulu migas merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh SKK Migas melalui Pedoman Tata Kerja (PTK) terkait Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Masyarakat, salah satunya yang dikenal sebagai PTK tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development), yang memuat antara lain sebagai berikut:

  - Pilar Pendidikan,
  - Pilar Kesehatan,
  - Pilar Ekonomi,
  - Pilar Lingkungan, dan
  - Tata Kelola dan Studi Pengembangan Masyarakat

- **Tahapan Implementasi Program**

  Laporan ini mencakup tahapan kegiatan mulai dari perencanaan program berbasis

kebutuhan masyarakat, pelaksanaan kegiatan, pemantauan program, hingga evaluasi dan pembelajaran program.

- **Kemitraan dan Kolaborasi**

  Pelaksanaan program pengembangan masyarakat melibatkan berbagai pihak melalui kemitraan strategis antara PHE NSO, pemerintah, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil.

BAB II

PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

A. Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat

PILAR	PROGRAM	AKTIVITAS	WILAYAH		DAMPAK OPERASI	
			DESA, KECAMATAN	KOTA	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG
PENDIDIKAN	Beasiswa Fellowships, NSO Scholarships	Beasiswa tingkat akhir, bantuan penulisan skripsi mahasiswa dengan topik relevan dengan pembangunan Masyarakat	Tentative, 10 Desa lingkungan, Kecamatan Muara Satu	Kota Lhokseumawe		✓
	Pendidikan Berbasis Komunitas: Sekolah Anak Laut	- Pembentukkan kelompok belajar anak - Kelas informal calistung bersama anak nelayan pesisir - Penambahan fasilitas literasi (buku dan alat tulis) - Penyelenggaraan wisuda sekolah anak laut	Teupin Kuyuen	Kabupaten Aceh Utara		✓
	Pendidikan Berbasis Komunitas: Peulara	- Penyusunan kurikulum hijau dengan sekolah - Pembangunan bank sampah	SMPN 6 Lhokseumawe, Batuphat Barat	Kota Lhokseumawe		✓

PILAR	PROGRAM	AKTIVITAS	WILAYAH		DAMPAK OPERASI	
			DESA, KECAMATAN	KOTA	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG
		- Pembentukkan kelompok pengelola bank sampah - Pelatihan dan pendampingan pengelolaan bank sampah - Pelatihan dan pendampingan pengelolaan sampah organic				
KESEHATAN	Peningkatan kualitas kesehatan (stunting) di wilayah operasi PHE NSO	- PMT balita - Pengadaan fasilitas posyandu balita - Pelatihan dan pendampingan kader posyandu serta ibu hamil-menyusui - Pembentukkan kelompok sadar gizi dan pengelolaan kebun pangan - Pengadaan kebun pangan untuk pasokan PMT	Paloh Punti, Muara Satu	Kota Lhokseumawe		✓
	Penyediaan MCK dan sanitasi air bersih	- Pembangunan MCK bagi keluarga	Paloh Punti, Muara Satu	Kota Lhokseumawe		✓

PILAR	PROGRAM	AKTIVITAS	WILAYAH		DAMPAK OPERASI	
			DESA, KECAMATAN	KOTA	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG
		dengan balita stunting, KEK, dan gizi buruk				
Ekonomi	Pemberdayaan Petani Garam	- Pembentukkan kelompok petani garam perempuan - Assessment kebutuhan awal petani garam untuk jalan program - Pengadaan alat produksi garam - Pelatihan dan pendampingan petani garam	Teupin Kuyuen	Kabupaten Aceh Utara		✓
	Pemberdayaan Petambak Udang dan Tiram	- Pembentukkan dan penguatan Lembaga kelompok petambak - Pelatihan dan pendampingan program - Pengadaan alat produksi, dan bibit udang	Teupin Kuyuen	Kabupaten Aceh Utara		✓
	Youth Entrepreneurships	- Pelatihan dan pendampingan	Desa Lingkungan, Muara Satu	Kota Lhokseumawe		✓

PILAR	PROGRAM	AKTIVITAS	WILAYAH		DAMPAK OPERASI	
			DESA, KECAMATAN	KOTA	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG
		pengelolaan potensi desa - Penilaian kebutuhan dan potensi desa				
EKONOMI	Budidaya Penggemukkan Sapi	- Penutupan program penggemukkan sapi - Evaluasi tahap akhir program penggemukkan sapi - Pemantauan kesehatan sapi - Pembelian sapi untuk kegiatan meugang dan iedul adha	Desa Lingkungan, Muara Satu	Kota Lhokseumawe		✓
LINGKUNGAN	Penghijauan	- Penanaman dan perawatan pohon darat, dan air di wilayah operasional	Tentative	Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara		✓
	Perhutanan Sosial	- Restorasi lahan kritis dengan diversifikasi tanaman hutan - Penanaman tanaman kakao sebagai salah satu tanaman ekonomis	Blang Pante, Paya Bakong	Kabupaten Aceh Utara		✓

PILAR	PROGRAM	AKTIVITAS	WILAYAH		DAMPAK OPERASI	
			DESA, KECAMATAN	KOTA	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG
		- Pelatihan dan pendampingan pengelolaan dan budidaya tanaman kakao - Penyediaan sarana dan prasarana penanaman kakao sesuai dengan SOP Pertanian - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program				
KEBENCANAAN	Bantuan Bencana Alam	- Penyaluran bantuan bencana berupa bahan pokok, maupun kebutuhan lain saat terjadi musibah. Bantuan bencana ini dapat berupa bantuan skala lokal hingga nasional	Tentative	Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara		✓
	Kebencanaan Inklusif	- Pelatihan dan pendampingan mitigasi kebencanaan di	SMPN 6 Lhokseumawe, Batuphat Barat, Muara Satu	Kota Lhokseumawe		✓

PILAR	PROGRAM	AKTIVITAS	WILAYAH		DAMPAK OPERASI	
			DESA, KECAMATAN	KOTA	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG
		wilayah sekitar operasional - Pembentukkan satgas kebencanaan inklusif - Pembuatan modul kebencanaan inklusif - Pengadaan sarana dan prasarana mitigasi kebencanaan				
Tata Kelola Kelembagaan	Studi	Pembuatan baseline studi untuk perusahaan dalam menentukkan program pengembangan masyarkat, serta mengukur capaian perusahaan melalui studi. Studi yang dilakukan oleh perusahaan antara lain adalah pemetaan social *(social mapping),* stakeholder engagement, kajian	Tentative	Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara		✓

PILAR	PROGRAM	AKTIVITAS	WILAYAH		DAMPAK OPERASI	
			DESA, KECAMATAN	KOTA	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG
		dampak lingkungan, dan IKM.				
	Jurnal dan ISBN	Penulisan jurnal ilmiah, maupun keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan penghargaan dalam maupun luar negeri.	Tentative	Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara		✓

B. Rencana Strategis Program Pengembangan Masyarakat

PILAR	PROGRAM	PENERIMA MANFAAT	JUSTIFIKASI	TH. PELAKSANAAN
PENDIDIKAN	Beasiswa Fellowships, NSO Scholarships	10 mahasiswa tingkat akhir	Dukungan Beasiswa Penelitian Tematik Tingkat Akhir sektor industri hulu migas kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu di WKP NSO Field Dengan tema-tema berikut : 1. Teknologi Optimalisasi produksi industri hulu migas 2. Pengelolaan lingkungan berbasis industri hulu migas	2022 – 2026

PILAR	PROGRAM	PENERIMA MANFAAT	JUSTIFIKASI	TH. PELAKSANAAN
			3. Pengembangan masyarakat berbasis industri hulu migas	
	Pendidikan Berbasis Komunitas: Sekolah Anak Laut	30 anak nelayan	Perusahaan membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan point-point SDG's yang berkaitan dengan anak. Hal ini juga menguatkan komitmen perusahaan untuk kemajuan pendidikan bangsa	2025 – 2030
	Pendidikan Berbasis Komunitas: Peulara	50 siswa SMP	Perusahaan membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan point-point SDG's yang berkaitan dengan anak. Hal ini juga menguatkan komitmen perusahaan untuk kemajuan pendidikan bangsa	2025 – 2030
KESEHATAN	Peningkatan kualitas kesehatan (stunting) di wilayah operasi PHE NSO	40 balita stunting, 10 kader posyandu	Program nasional terkait dengan pengentasan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan di wilayah operasi PHE NSO	2024 -2029

PILAR	PROGRAM	PENERIMA MANFAAT	JUSTIFIKASI	TH. PELAKSANAAN
	Penyediaan MCK dan sanitasi air bersih	6 keluarga dengan balita stunting, KEK, atau gizi buruk	Program nasional terkait dengan pengentasan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan (PHBS) di wilayah operasi PHE NSO	2023 - 2025
EKONOMI	Pemberdayaan Petani Garam	20 perempuan petani garam tradisional	PHE NSO memiliki dua wilayah produksi, salah satunya berada di lepas pantai *(offshore)* yang berlokasi di Kecamatan Seunuddon. Kecamatan Senuddon yang berada di Wilayah Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu wilayah penghasil garam di Provinsi Aceh. Keunikan dari proses pembuatan garam di wilayah Aceh Utara adalah sebagian besar petani garam adalah lansia perempuan yang berada di garis kemiskinan. Kondisi ini juga sudah disampaikan dalam sosmap yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023.	2025 – 2030
	Pemberdayaan Petambak Udang dan Tiram	20 petambak udang dan tiram. @10 orang	PHE NSO memiliki dua wilayah produksi, salah satunya berada di lepas pantai *(offshore)* yang berlokasi di Kecamatan Seunuddon. Kecamatan Senuddon yang berada di Wilayah	2025 -2030

PILAR	PROGRAM	PENERIMA MANFAAT	JUSTIFIKASI	TH. PELAKSANAAN
			Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu wilayah penghasil garam di Provinsi Aceh. Keunikan dari proses pembuatan garam di wilayah Aceh Utara adalah sebagian besar petani garam adalah lansia perempuan yang berada di garis kemiskinan. Kondisi ini juga sudah disampaikan dalam sosmap yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023.	
	Youth Entrepreneurships	10 umkm Masyarakat desa lingkungan	Berdasarkan laporan pemetaan sosial terdapat masalah sumberdaya pemuda rendah karena banyak yang belum memiliki kecakapan dan keterampilan sehingga menyebabkan mereka memperoleh pekerjaan dibawah standar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan minat wirausaha pemuda untuk mengurangi tingkat penganguran di WKP NSO Field	2025 – 2030
	Budidaya Penggemukkan Sapi	25 anggota kelompok pengelola budidaya	Pada pemetaan sosial terdapat program intergrated farming yang menggarisbawahi tentang peternakan dan pertanian terintegrasi.	2023 -2025

PILAR	PROGRAM	PENERIMA MANFAAT	JUSTIFIKASI	TH. PELAKSANAAN
		penggemukkan sapi	Pada tahap eksekusi dengan memperhatikan kondisi sekitar, saat ini pengembangan yang dilakukan baru sampai pada peternakan sapi terintegrasi berbasis kearifan lokal. Program ini merupakan program improvement dari yang sudah dilaksanakan oleh PHE NSO sebelumnya.	
LINGKUNGAN	Penghijauan	100 orang	Sebagai bentuk peningkatan jumlah tutupan vegetasi yang ada di wilayah operasional perusahaan dengan berkoordinasi dengan stakeholder	2022 - ….
	Perhutanan Sosial	20 petani kakao, 15 kelompok UPG	Adanya kemitraan yang dijalin oleh perusahaan dengan lembaga konservasi lingkungan dan hewan	2025 – 2030
KEBENCANAAN	Bantuan Bencana Alam	Tentative	Berdasarkan dokumen kebencanaan, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi bencana banjir setiap tahunnya	Tentative

PILAR	PROGRAM	PENERIMA MANFAAT	JUSTIFIKASI	TH. PELAKSANAAN
	Kebencanaan Inklusif	50 siswa dan guru	Upaya meningkatkan inklusivitas penanangan bencana di sekitar wilayah operasi	2025 -2030
TATA KELOLA KELEMBAGAAN	Studi	Tentative	Salah satu syarat dokumen dalam Penilaian PROPER, pembentukkan baseline studi perusahaan serta kebijakan CSR dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat	Tentative
	Jurnal dan ISBN	Tentative	Salah satu syarat dokumen dalam Penilaian PROPER	Tentative

C. Rencana Kerja Program Pengembangan Masyarakat

PILAR	PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN	TAHAP PELAKSANAAN				Anggaran (Rp -juta)	Ket.
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
PENDIDIKAN	Beasiswa Fellowships, NSO Scholarships	- Terdapat 10 mahasiswa tingkat akhir yang memperoleh bantuan keringanan studi untuk skripsi					Rp 48,3jt	
	Pendidikan Berbasis Komunitas: Sekolah Anak Laut	- Terlaksana minimal 6x sekolah pesisir selama satu tahun					Rp 40,250jt	Dialihkan sebesar 10jt ke bantuan kebencanaan

PILAR	PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN	TAHAP PELAKSANAAN				Anggaran (Rp -juta)	Ket.
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
		- Terdapat minimal 2 kelompok belajar - Terdapat 1 kurikulum belajar bersama - Pengadaan 20 buku bacaan baru - Pengadaan pendukung Pendidikan (tas, buku, alat tulis) untuk peserta sekolah anak laut - Terlaksana minimal 1x wisuda anak pesisir						saat terjadi bencana hidrometrologi (Nov 25)
	Pendidikan Berbasis Komunitas: Peulara	- Terjalin hubungan dengan instansi Pendidikan, minimal 1 instansi pendidikan - Terbentuk 1 kelompok pengelola bank sampah - Terbentuk bank sampah - Terlaksana minimal 4x pelatihan pemilahan sampah, sampai pemrosesan sampah. - Terlaksana minimal 2x monitoring dan evaluasi					Rp 40,250 jt	
KESEHATAN	Peningkatan kualitas kesehatan (stunting) di wilayah operasi PHE NSO	- Terlaksana PMT selama minimal 56 hari pada balita stunting, dan KEK - PMT mencakup ke 40 balita					Rp 144,9jt	Dialihkan sebesar 20jt ke bantuan kebencanaan saat terjadi

PILAR	PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN	TAHAP PELAKSANAAN				Anggaran (Rp -juta)	Ket.
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
		- Terlaksana minimal 3x pelatihan dan penyuluhan gizi kepada ibu hamil dan kader posyandu - Tersedianya kebun pangan desa - Terbentuknya minimal 1 kelompok pengelola kebun pangan - Terlaksana minimal 2x pelatihan pengelolaan hasil kebun pangan						bencana hidrometrologi (Nov 25)
	Penyediaan MCK dan sanitasi air bersih	- Adanya minimal 5 MCK untuk keluarga dengan balita stunting, atau KEK					Rp 80,5jt	
Ekonomi	Pemberdayaan Petani Garam	- Terbentuk dan diresmikannya kelompok petani garam - Terlaksana pelatihan dan pendampingan pengelolaan garam minimal 6x dalam satu tahun - Pengadaan barang dan fasilitas pengelolaan garam dengan layak					Rp 128,8jt	Dialihkan sebesar 20jt ke bantuan kebencanaan saat terjadi bencana hidrometrologi (Nov 25)
	Pemberdayaan Petambak Udang dan Tiram	- Pembentukkan minimal 1 kelompok petambak - Pelatihan dan pendampingan petambak					Rp 64,4jt	

PILAR	PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN	TAHAP PELAKSANAAN				Anggaran (Rp -juta)	Ket.
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
		udang vaname dan tiram minimal 5x dalam satu tahun untuk setiap program - Pengadaan sarana dan prasarana petambak						
	Youth Entrepreneurships	- Terpetakan minimal 10 kelompok UMKM di tingkat desa - Terlaksana minimal 5x pelatihan dan pendampingan - Terlaksana monitoring dan evaluasi minimal 1x					Rp 80,5jt	Dialihkan sebesar 10jt ke bantuan kebencanaan saat terjadi bencana hidrometrologi (Nov 25)
EKONOMI	Budidaya Penggemukkan Sapi	- Terlaksana monitoring dan evaluasi program sebanyak 2x - Pembelian sapi untuk meugang minimal 2 sapi dalam satu tahun - Pengecekkan kesehatan hewan ternak					Rp 48,3jt	Dialihkan sebesar 10jt ke bantuan kebencanaan saat terjadi bencana hidrometrologi (Nov 25)
LINGKUNGAN	Penghijauan	- Terlaksana penanaman 5000 tanaman darat dan air di sekitar wilayah operasional					Rp 80,5jt	
	Perhutanan Sosial	- Terbentuknya 1 kelembagaan petani kakao - Terlaksana restorasi lahan kritis seluas minimal 1 ha					Rp 112,8jt	

PILAR	PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN	TAHAP PELAKSANAAN				Anggaran (Rp -juta)	Ket.
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
		- Terlaksana pelatihan dan pendampingan 6x dalam satu tahun - Terlaksana monitoring dan evaluasi minimal 2x dalam satu tahun - Pengadaan sarana dan prasarana pertanian kakao						
KEBENCANAAN	Bantuan Bencana Alam	- Mendistribusikan bahan pokok, serta kebutuhan sandang pada saat bencana di sekitar wilayah perusahaan					Rp 80,5jt	
	Kebencanaan Inklusif	- Terbentuknya minimal 2 kemitraan terkait kesiapsiagaan bencana - Terbentuknya minimal 1 satuan gugus tugas kebencanaan inklusif - Terlaksana minimal 3x pelaksanaan pelatihan mitigas kebencanaan dan kelas mitigas - Terdapat 1 modul kebencanaan - Pengadaan sarana dan prasarana penanda upaya mitigasi					Rp 112,8 jt	Dialihkan sebesar 20jt ke bantuan kebencanaan saat terjadi bencana hidrometrologi (Nov 25)

PILAR	PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN	TAHAP PELAKSANAAN				Anggaran (Rp -juta)	Ket.
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Tata Kelola Kelembagaan	Studi	- Terdapat minimal studi pemetaan social yang berisikan potensi masyarakat, serta saran program pengembangan masyarakat					Rp 193,2jt	
	Jurnal dan ISBN	- Mengikuti dan/atau penulisan jurnal ilmiah minimal 1x dalam satu tahun - Mengikuti dan/atau penghargaan tingkat nasional atau internasional minimal 1					Rp 32,2jt	

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

A. Dinamika Program Pengembangan Masyarakat

1. Pilar Pendidikan

- Beasiswa Fellowships

  Waktu : Juli – September 2025
  Lokasi : Universitas Malikussaleh
  Peserta : 10 Mahasiswa tingkat akhir yang sedang menjalani masa skripsi

  Pada periode ini terjadi perubahan dalam skema pemberian beasiswa dari PHE NSO. Hal ini dikarenakan adanya perubahan capaian dan outcome yang dituju oleh perusahaan. Selain itu, berdasarkan diskusi dan tindak lanjut serta monitoring evaluasi yang dilakukan oleh PHE NSO dengan Universitas Malikussaleh ditemukan adanya masalah kesulitan penyelesaian studi pada mahasiswa tingkat akhir dari segi pembiayaan. PHE NSO melihat kondisi tersebut sebagai tantangan sekaligus komitmen untuk mendukung pendidikan bagi setiap kalangan, sehingga lahir keputusan untuk mengubah bentuk program csr.

- Sekolah Anak Laut

  Waktu : Juni – Desember 2025
  Lokasi : Pantai Bantayan; Desa Teupin Kuyuen, Aceh Utara
  Peserta : 30 anak nelayan, 7 pendamping komunitas

  Permasalahan sosial yang terpotret dalam pemetaan sosial di wilayah Teupin Kuyuen adalah minimnya partisipasi anak-anak nelayan dalam lingkungan pendidikan formal, kemampuan dasar anak untuk melakukan calistung serta rendah diri dalam kemampuan akademik. Sebagai komitmen PHE NSO dalam upaya peningkatan kualitas SDM, program sekolah anak laut hadir untuk menjadi wadah pengisi antara gap pendidikan formal dengan kondisi anak-anak nelayan di Teupin Kuyuen. Kegiatan sekolah anak laut diselenggarakan tiap dua minggu sekali dan dilakukan bergantian titiknya di sepanjang Pantai Bantayan, maupun titik

lain di Desa Teupin Kuyuen. Hal ini dikarenakan, tujuan dari program merupakan ini adalah peningkatan kesadaran anak untuk belajar, dibarengi juga dengan peningkatan kemampuan anak dalam calistung serta kepercayaan diri. Program ini ditutup tiap periode nya dengan adanya 'wisuda', yakni seremoni penutupan yang dilakukan tiap enam bulan sekali untuk anak-anak. Pada kegiatan ini, PHE NSO dibantu dengan komunitas anak muda menyelenggarakan kunjungan ke area TNI-AL, sekaligus penyerahan rapor kegiatan anak-anak.

- Peulara

  Waktu : Agustus – Desember 2025
  Lokasi : SMPN 6 Lhokseumawe
  Peserta : 40 siswa, 3 guru pendamping

  Pelaksanaan program ini berfokus pada dukungan perusahaan pada capaian sekolah adiwiyata di Kota Lhokseumawe. SMP Negeri 6 dipilih sebagai pilot project dalam dukungan ini dikarenakan wilayah sekolah yang berada pada ring 1 perusahaan. Dukungan pada kegiatan adiwiyata di SMPN 6 Lhokseumawe berpusat pada pengembangan dan pengelolaan bank sampah, serta peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan program ini dilakukan dengan mengajak Universitas Malikussaleh sebagai mentor pendamping kegiatan.

  SMP Negeri 6 Lhokseumawe memiliki potensi pengembangan dan pemanfaatan untuk adiwiyata yang lebih luas dan kompleks, namun belum dilakukan karena keterbatasan anggaran juga kemampuan pendampingan oleh tenaga ahli dan praktisi untuk pengelolaan sampah. Berkaitan dengan hal tersebut, PHE NSO hadir dengan menekankan pada kolaborasi multipihak dan telah berjalan cukup baik di SMP Negeri Lhokseumawe selama satu semester di tahun 2025. Kerja sama yang sama juga masih akan dilanjutkan di tahun 2026 dengan peningkatan kapasitas serta

pembuatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan sampah.

2. Pilar Kesehatan
   - Pengentasan Stunting

     Waktu : Juni – November 2025
     Lokasi : Paloh Punti
     Penerima Manfaat : 40 balita stunting, dan KEK. 10 kader posyandu, 20 ibu hamil.

     Komitmen PHE NSO dibidang kesehatan ditunjukkan dengan pemilihan Gampong Paloh Punti sebagai pilot project dalam upaya pengentasan stunting di sekitar wilayah operasional. Pemilihan ini didasarkan dari hasil konsultasi dengan pemerintah tingkat kecamatan dan puskesmas pada tahun 2024. Paloh Punti berada pada peringkat atas untuk balita dengan kondisi stunting, dan memiliki fasilitas pendukung kesehatan balita yang minim. Berdasar arahan dan kondisi tersebut, PHE NSO berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Paloh Punti.

     Dalam upaya penurunan stunting tidak dapat dilakukan dengan kegiatan karitatif melainkan terprogram dan terencana. Maka dari itu program di wilayah ini sifatnya terstruktur dan bertahap serta memiliki pola pengulangan. Pola pengulangan tersebut dapat dilihat dari kegiatan PMT balita selama minimal 56 hari, pelatihan peningkatan kapasitas pada kader posyandu, dan ibu hamil, serta perbaikan sarana dan prasarana Rumoh Gizi Gampong dan Posyandu.

   - Pembangunan MCK

     Waktu : September 2025
     Lokasi : Paloh Punti
     Peserta : 5 keluarga dengan balita stunting atau KEK

     Program pembangunan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) merupakan salah satu bentuk komitmen pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diinisiasi oleh PHE NSO sejak tahun 2023. Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi sebagian keluarga penerima manfaat yang

masih memiliki keterbatasan akses terhadap sarana sanitasi yang layak. Di sisi lain, beberapa keluarga tersebut juga merupakan keluarga dengan anggota rumah tangga yang termasuk dalam kelompok rentan, khususnya keluarga yang memiliki balita dengan kondisi stunting serta ibu dengan status Kekurangan Energi Kronis (KEK). Kondisi sanitasi yang tidak memadai berpotensi memperburuk masalah kesehatan keluarga, terutama pada masa tumbuh kembang anak yang membutuhkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Melalui pembangunan fasilitas MCK yang layak, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sanitasi rumah tangga sekaligus mendukung upaya pencegahan berbagai penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan infeksi lainnya yang dapat memengaruhi status gizi anak. Ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat bagi ibu dan balita, sehingga secara tidak langsung turut berkontribusi dalam upaya penurunan angka stunting serta peningkatan kesehatan keluarga.

3. Pilar Ekonomi
    - Pemberdayaan Petani Garam

      Waktu : Mei – Desember 2025
      Lokasi : Teupin Kuyuen
      Peserta : 20 anggota kelompok petani garam

      Program pemberdayaan petani garam perempuan di Aceh Utara merupakan bagian dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok perempuan melalui penguatan usaha produksi garam tradisional. Program ini difokuskan pada upaya peningkatan keterampilan dasar produksi, pengelolaan usaha sederhana, serta penguatan peran perempuan dalam aktivitas ekonomi rumah tangga di wilayah pesisir.

Melalui program ini, perusahaan berupaya membuka ruang bagi perempuan petani garam untuk memperoleh dukungan pengembangan usaha sekaligus meningkatkan nilai tambah dari aktivitas produksi yang selama ini telah dijalankan secara turun-temurun.

Dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan kapasitas individu yang masih sangat sederhana dalam aspek pengelolaan usaha maupun pengembangan produk. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi produksi, serta jaringan pemasaran turut memengaruhi kemampuan kelompok dalam mengembangkan usaha secara lebih luas. Tantangan lain yang juga menjadi perhatian adalah masih terbatasnya tingkat kolektivisme antar individu dalam kelompok, sehingga kerja sama dan koordinasi dalam kegiatan bersama belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam merancang pendekatan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas individu sekaligus mendorong terbentuknya solidaritas kelompok yang lebih kuat di masa mendatang.

- Pemberdayaan Petambak Udang dan Tiram

  Waktu : Agustus – September 2025
  Lokasi : Teupin Kuyuen
  Peserta : 20 anggota kelompok

  Program pemberdayaan petani tiram dan udang merupakan inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mulai dilaksanakan pada tahun ini sebagai upaya mendukung pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir. Program ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya pesisir melalui budidaya tiram dan udang, sekaligus mendorong terbentuknya kelompok masyarakat sebagai wadah pengelolaan usaha secara bersama.

Sebagai tahun pertama pelaksanaan, program ini masih berada pada tahap penguatan dasar, terutama dalam aspek kelembagaan kelompok dan peningkatan kapasitas individu petani. Tantangan utama yang dihadapi meliputi proses pembentukan struktur kelompok yang efektif serta keterbatasan kemampuan teknis dan pengelolaan usaha pada tingkat individu, sehingga pendampingan dan penguatan kapasitas menjadi fokus utama dalam tahap awal pengembangan program.

- Youth Entrepreneurships

  Waktu : Juni – November 2025
  Lokasi : 10 Desa lingkungan, seleksi
  Peserta : UMKM lokal

  Program Youth Entrepreneurship merupakan salah satu inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha muda di tingkat desa sekaligus memperkuat potensi ekonomi lokal. Kegiatan ini berfokus pada proses identifikasi dan pemilihan pelaku UMKM potensial di wilayah desa yang memiliki peluang untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, program ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pemanfaatan dukungan CSR yang telah berjalan di desa lingkungan, sehingga perusahaan dapat melihat secara lebih komprehensif dampak program ekonomi yang telah diberikan serta potensi pengembangan usaha masyarakat ke depan.

  Melalui proses seleksi dan pemetaan tersebut, diperoleh sejumlah pelaku UMKM yang dinilai memiliki komitmen dan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai wirausaha muda desa. Hasil dari kegiatan ini menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut program berupa pendampingan intensif yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Pendampingan tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha, baik dari sisi pengelolaan usaha, pengembangan produk, maupun perluasan akses pasar, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi

masyarakat serta menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat di wilayah desa sekitar operasi perusahaan.

- Penggemukkan Sapi

  Waktu : Agustus – November 2025
  Lokasi : 10 Desa lingkungan, seleksi
  Peserta : Kelompok peternak

  Program budidaya penggemukan sapi merupakan salah satu inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang sebelumnya dikembangkan sebagai upaya mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa melalui sektor peternakan. Program ini dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat melalui pengelolaan usaha ternak secara bersama, sekaligus memanfaatkan potensi lokal yang masih cukup besar dalam pengembangan usaha peternakan sapi. Pada tahun pelaksanaan ini, kegiatan program difokuskan pada pengadaan sapi yang dipersiapkan untuk kebutuhan pasar lokal menjelang tradisi meugang, yang merupakan momentum penting bagi masyarakat Aceh dengan meningkatnya permintaan daging sapi. Selain itu, untuk memastikan kondisi ternak tetap optimal, kegiatan juga disertai dengan pemeriksaan kesehatan sapi guna menjaga kualitas dan kelayakan ternak sebelum dipasarkan.

  Namun demikian, dalam perjalanannya program ini menghadapi sejumlah dinamika dalam pengelolaan kelompok di tingkat desa, khususnya terkait dengan mekanisme administrasi dan pelaporan kegiatan yang belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemantauan perkembangan program menjadi kurang maksimal. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, tahun pelaksanaan ini ditetapkan sebagai tahun terakhir program budidaya penggemukan sapi. Ke depan, evaluasi dari pelaksanaan program ini akan menjadi pembelajaran penting bagi perusahaan dalam merancang program

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan di wilayah desa sekitar operasi perusahaan.

4. Pilar Lingkungan
   - Penanaman Pohon

Waktu	: April – November 2025
Lokasi	: Unimal, SMPN 6 Lhokseumawe, Blang Pante, Cot Girek, Teupin Kuyuen
Peserta	: 100 orang

Program penanaman pohon merupakan salah satu inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas ekosistem di wilayah sekitar operasi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tersebar di beberapa lokasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, kelompok masyarakat, serta institusi lokal lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus memastikan bahwa kegiatan penanaman tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang, seperti peningkatan tutupan vegetasi, pengurangan risiko erosi, serta perbaikan kualitas lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keberlanjutan perawatan pasca penanaman. Tanaman yang telah ditanam memerlukan pemeliharaan secara berkala agar dapat tumbuh optimal dan tidak terbengkalai setelah kegiatan penanaman selesai. Oleh karena itu, dalam pengembangan program ke depan diperlukan pendekatan yang lebih adaptif, salah satunya melalui kombinasi penanaman antara tanaman konservasi dan tanaman bernilai ekonomis. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kepemilikan serta motivasi masyarakat dalam menjaga dan merawat tanaman, sehingga keberlanjutan program

penanaman pohon dapat terjaga sekaligus memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

- Perhutanan Sosial

  Waktu : Mei – November 2025
  Lokasi : Blang Pante, Aceh Utara
  Peserta : 20 anggota kelompok petani kakao; 15 anggota kelompok UPG

  Program Perhutanan Sosial merupakan bagian dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Program ini dilaksanakan di wilayah Cot Girek serta Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, melalui beberapa kegiatan utama, antara lain restorasi lahan kritis sebagai upaya pemulihan fungsi ekosistem, pemberdayaan petani kakao perempuan kepala keluarga untuk memperkuat kemandirian ekonomi, serta perbaikan jalur gajah guna mendukung upaya mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar di sekitar kawasan hutan.

  Melalui rangkaian kegiatan tersebut, perusahaan berupaya mendorong keseimbangan antara aspek konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Restorasi lahan dan perbaikan jalur gajah diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekosistem serta menjaga keberlangsungan habitat satwa, sementara pemberdayaan petani kakao perempuan kepala keluarga menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas ekonomi kelompok rentan di wilayah program. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis dan sosial secara berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

5. Tata Kelola Kelembagaan
   - Studi, Jurnal, dan ISBN

Kegiatan studi yang meliputi social mapping, penyusunan jurnal, serta publikasi ber-ISBN merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis pada data dan analisis yang komprehensif. Studi social mapping dilakukan untuk memetakan kondisi sosial, potensi wilayah, serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat sekitar wilayah operasi. Hasil kajian tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan prioritas program CSR secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan studi ini juga merupakan bagian dari praktik yang secara konsisten dilakukan oleh perusahaan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan program CSR yang terpusat. Selain itu, kegiatan kajian dan publikasi ini sejalan dengan arahan dari SKK Migas selaku regulator industri hulu migas, yang mendorong perusahaan untuk mengembangkan program pengembangan masyarakat berbasis kajian ilmiah dan dokumentasi yang akuntabel. Dengan demikian, hasil studi tidak hanya menjadi referensi internal perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan pengetahuan dan praktik pemberdayaan masyarakat di wilayah operasi.

6. Kebencanaan
    - Bantuan Bencana Alam

      Program pengembangan masyarakat pada bidang tanggap kebencanaan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan respon cepat terhadap situasi darurat yang terjadi di wilayah sekitar operasi. Dalam pelaksanaannya, PHE NSO menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak berbagai kejadian kebencanaan insidental, seperti kebakaran permukiman dan longsor skala kecil yang terjadi di beberapa wilayah desa. Selain itu, pada akhir November 2025 perusahaan juga turut memberikan dukungan bantuan kepada masyarakat yang

terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah operasional, sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar. Pelaksanaan program tanggap kebencanaan ini bersifat tentatif dan menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan yang muncul di lapangan. Oleh karena itu, intervensi yang diberikan lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak pada tahap awal kejadian, seperti bantuan logistik dan kebutuhan pokok. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam situasi darurat sekaligus memperkuat peran perusahaan dalam mendukung ketahanan sosial masyarakat di wilayah sekitar operasi.

- Kebencanaan Inklusif

  Waktu : September – Desember 2025
  Lokasi : SMP N 6 Lhokseumawe
  Peserta : 60 siswa, 10 guru pendamping, 12 anggota BPBD Kota Lhokseumawe

  Program pengembangan masyarakat dalam bidang kebencanaan inklusif dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan, dalam menghadapi potensi risiko bencana. Program ini diwujudkan melalui kegiatan pelatihan mitigasi bencana yang menyasar siswa dan guru sebagai kelompok strategis dalam membangun kesadaran serta kesiapsiagaan sejak dini. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman dasar mengenai potensi bencana, langkah-langkah mitigasi, serta prosedur keselamatan yang perlu dilakukan dalam situasi darurat di lingkungan sekolah.

  Sebagai bagian dari luaran program, kegiatan ini menghasilkan modul pembelajaran mitigasi bencana yang dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah sebagai bahan edukasi berkelanjutan. Selain itu, melalui proses pendampingan dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekolah sasaran yaitu SMP Negeri 6 Lhokseumawe juga

memperoleh pernyataan sebagai Sekolah Aman Bencana. Pengakuan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip kesiapsiagaan bencana serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi seluruh warga sekolah.

B. Tantangan Program Pengembangan Masyarakat

Berikut analisis tantangan pelaksanaan program TJSL berdasarkan berbagai kegiatan pengembangan masyarakat yang telah dilaksanakan:

1. Penguatan Kelembagaan Masyarakat yang Masih Terbatas

Sebagian program pemberdayaan masyarakat masih menghadapi tantangan pada aspek kelembagaan kelompok. Struktur organisasi kelompok, mekanisme koordinasi, serta sistem administrasi dan pelaporan kegiatan belum berjalan secara optimal di beberapa lokasi program. Kondisi ini berdampak pada proses monitoring, evaluasi, serta keberlanjutan program, karena kelembagaan kelompok belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi pengelolaan program secara mandiri dan akuntabel.

2. Kapasitas Individu dan Literasi Program yang Beragam

Kemampuan individu penerima manfaat dalam mengelola usaha, memahami aspek teknis kegiatan, maupun mengembangkan inisiatif ekonomi masih relatif beragam dan cenderung sederhana pada beberapa kelompok sasaran. Keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi, serta pengalaman pengelolaan usaha menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan adaptasi masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dijalankan.

3. Keterbatasan Waktu Pendampingan Program

Sebagian program pemberdayaan memerlukan proses pendampingan yang berkelanjutan agar mampu menghasilkan dampak yang lebih optimal. Namun demikian, keterbatasan waktu pelaksanaan program dalam satu siklus kegiatan seringkali menjadi tantangan tersendiri, khususnya untuk program yang memerlukan perubahan perilaku, penguatan kapasitas, serta pembentukan kelembagaan masyarakat yang solid.

4. Keterbatasan Akses terhadap Praktisi dan Tenaga Profesional

Beberapa program teknis, seperti pengembangan usaha masyarakat, konservasi lingkungan, maupun mitigasi kebencanaan, membutuhkan dukungan tenaga ahli atau praktisi yang memiliki kompetensi spesifik. Dalam pelaksanaannya, ketersediaan tenaga profesional yang dapat mendampingi program secara intensif di wilayah operasional masih menjadi tantangan, baik dari sisi jumlah, waktu keterlibatan, maupun biaya pendampingan.

5. Dinamika Sosial dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan program juga dipengaruhi oleh dinamika sosial di tingkat masyarakat, seperti tingkat kolektivitas kelompok, perbedaan kepentingan antar individu, serta komitmen partisipasi dalam kegiatan bersama. Pada beberapa kasus, kondisi ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam kegiatan yang membutuhkan kerja sama kelompok secara konsisten.

6. Kebutuhan Pembiayaan Sosial Pendukung Program

Dalam beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat, terdapat kebutuhan biaya sosial yang muncul di tingkat lokal, seperti kegiatan pertemuan kelompok, koordinasi komunitas, atau kegiatan sosial lain yang menjadi bagian dari dinamika masyarakat. Pengelolaan kebutuhan tersebut memerlukan pendekatan yang bijak agar tetap mendukung keberlangsungan program tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan TJSL.

Secara umum, berbagai tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam merancang pendekatan program yang lebih adaptif, memperkuat pendampingan masyarakat, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pengembangan masyarakat di wilayah operasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan telah berjalan melalui berbagai intervensi di bidang pemberdayaan ekonomi, kesehatan lingkungan, konservasi, kebencanaan, serta penguatan kapasitas masyarakat. Program-program tersebut dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif bersama pemangku kepentingan di wilayah sekitar operasi, serta didukung oleh berbagai kajian seperti social mapping sebagai dasar perencanaan program. Upaya ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan program pengembangan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lokal sekaligus selaras dengan kebijakan dan arahan regulator.

Dalam implementasinya, beberapa tantangan masih ditemukan pada aspek kelembagaan masyarakat, kapasitas individu penerima manfaat, serta dinamika sosial di tingkat komunitas. Keterbatasan sistem pengelolaan kelompok, administrasi, dan pelaporan kegiatan pada beberapa program memengaruhi proses monitoring dan keberlanjutan program. Selain itu, keterbatasan waktu pendampingan, akses terhadap tenaga profesional atau praktisi, serta kebutuhan biaya sosial dalam dinamika masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Secara lebih spesifik, tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pengembangan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh intervensi program itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan lokal, kapasitas individu, serta dukungan ekosistem yang mendukung keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan agar program tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.

B. Rekomendasi dan Saran

- **Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat**

Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat, terutama dalam aspek tata kelola organisasi, pembagian peran, administrasi, serta sistem pelaporan kegiatan. Penguatan ini penting agar kelompok mampu menjalankan program secara lebih mandiri, transparan, dan berkelanjutan.

- **Peningkatan Pendampingan dan Kapasitas Individu**

Program pemberdayaan perlu disertai dengan pendampingan yang lebih intensif untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajemen usaha, serta literasi program bagi penerima manfaat. Pendampingan yang konsisten diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas individu dan kelompok.

- **Penguatan Kolaborasi dengan Praktisi dan Lembaga Pendukung**

Perusahaan disarankan untuk memperluas kolaborasi dengan akademisi, lembaga pelatihan, maupun praktisi profesional guna mendukung program-program yang memerlukan keahlian teknis khusus. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pendampingan serta transfer pengetahuan kepada masyarakat.

- **Peningkatan Sinergi dengan Pemerintah Daerah**

Peran pemerintah daerah perlu diperkuat dalam mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, baik melalui dukungan kebijakan, integrasi dengan program pembangunan daerah, maupun penguatan pendampingan kepada kelompok masyarakat.

- **Penguatan Dukungan Pemerintah dalam Menjaga Kondusivitas Sosial**

Diperlukan peningkatan peran pemerintah dan aparat terkait dalam menjaga kondusivitas lingkungan sosial di wilayah program, termasuk dalam meminimalisir praktik-praktik premanisme lokal yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Lingkungan sosial yang aman dan kondusif akan mendukung kelancaran pelaksanaan program serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih positif.